



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE**

JALAN BLANGKEJEREN KM. 3,5 KUTACANE 24652
TELEPON (0629) 21217 21840 FAKSIMILI (0629) 21222

Nomor : S-392/WPB.01/KP.105/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil
Pembinaan Supervisi dan Penilaian
Kinerja KPPN Kutacane Semester II Tahun
2017

11 April 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
Gedung A, Gedung Keuangan Negara
Jalan Tgk. Chik Ditiro
Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Nomor S-531/WPB.01/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang kami terima tanggal 4 April 2018 hal Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN Periode Semester II Tahun 2017, bersama ini disampaikan tindak lanjut permasalahan Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN, Pelayanan Perbendaharaan dan Tata Kelola pada KPPN Kutacane berikut dokumen pendukungnya.

Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 197112271993011001

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN SUPERVISI KPPN KUTACANE
SEMESTER II TAHUN 2017**

NO.	UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	PERATURAN / KETENTUAN TERKAIT	PIC SUBBAGIAN / SEKSI	TINDAK LANJUT
1.	Tugas Kuasa BUN	SPM GUP satker Kankemenag Gayo Lues No.00069 dan No.00070/653683/2017 tanggal 18/07/2017 mengalami keterlambatan 44 hari kerja telah dilengkapi dengan surat pernyataan keterlambatan penyelesaian tagihan SPM LS Non Belanja Pegawai lebih dari 17 hari kerja. Seharusnya SPM GUP dilengkapi dengan surat penjelasan keterlambatan revolving UP lebih dari 1 (satu) bulan sesuai dengan format pada lampiran VI huruf A Surat Dirjen PBN No. S-2570/PB/2017	Agar SPM GUP Kankemenag Gayo Lues No.00069 dan No.00070/653683/2017 tersebut dilengkapi dengan surat penjelasan keterlambatan revolving UP lebih dari 1 (satu) bulan, sesuai dengan format pada lampiran VI huruf A Surat Dirjen PBN No. S-2570/PB/2017	1. Surat Menteri Keuangan No. S-153/MK.05/2017 2. Surat Dirjen PBN No. S-2570/PB/2017	Seksi PDMS	SPM sudah dilengkapi dengan surat Keterlambatan sesuai S-2570, namun format yang digunakan adalah surat pernyataan keterlambatan untuk SPM LS. Hal ini sudah disampaikan kepada satker Kemenag Gayo Lues, dan sudah dilakukan perbaikan, terlampir surat pernyataan keterlambatan revolving UP sebagaimana dalam Lampiran VI S-2570/PB/2017 (terlampir Surat KPA Kemenag Gayo Lues No. B-2011/Kk.01.16/KU.00.1/07/2017
2.	Tugas Kuasa BUN	Terdapat ketidaksesuaian pada uraian SPM gaji induk bulan Desember 2017 satker MIN Simpang Semadam (Nomor SPM 00104T/614176/2017) tertulis "...sesuai SPP No.000104 tanggal 6 September 2017" seharusnya tertulis "...tanggal 6 November 2017)	Petugas FO agar meningkatkan ketelitian dalam pengecekan uraian SPM	S-2570/PB/2017 PMK No. 190/PMK.05/2012	Seksi PDMS	Sudah dilakukan koreksi dengan surat nomor S-1290/WPB.01/KP.105/2017 tanggal 13 Des. 2017
3.	Tugas Kuasa BUN	Masih terdapat keterlambatan pengajuan SPM gaji Induk bulan Nopember 2017 dan belum dibuat teguran : 1. MTSN Jongar Kab. Aceh Tenggara,(614450) SPP 00120 tgl. 18 Oktober 2017	Penyampaian SPM LS gaji induk paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran	PMK No. 190/PMK/2012	Seksi PDMS	Gaji Bulan Nopember sudah disampaikan sebelum tanggal 15, <u>terlampir</u> bukti penerimaan oleh aplikasi konversi atas SPM satker dimaksud. Namun sesudah diterima konversi ditemukan

NO.	UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	PERATURAN / KETENTUAN TERKAIT	PIC SUBBAGIAN / SEKSI	TINDAK LANJUT
		<p>2. Polres Aceh Tenggara(640270) SPP No.455 tgl. 16-10-2017</p> <p>3. MTSN Kutacane Kab. Aceh Tenggara(309108) SPP No.99 tgl. 16-10-2017</p>				<p>kesalahan sebagian besar tertolak karena permasalahan Supplier dalam aplikasi SPM. Sehingga dikembalikan. Dan ketika diperbaiki maka nomor SPM yang lama tidak dapat digunakan lagi, sehingga no SPM menjadi berubah. Dan ketika disampaikan lagi sudah di atas tanggal 15 dan nomor SPM sudah berubah, sehingga jika memeriksa keterlambatan gaji hanya berdasarkan lembar konversi atas SPM yang telah diterbitkan SP2D nya, maka history keseluruhan SPM terkait pembuatan gaji induk, tidak akan tercover, sehingga seolah-olah SPM gaji dimasukkan ke KPPN terlambat. Padahal sebenarnya SPM Gaji induk telah dimasukkan terlebih dahulu dengan no SPM yang berbeda. Oleh Sebab itu KPPN kutacane tidak menerbitkan surat teguran atas "keterlambatan" dimaksud</p>

NO.	UNSUR PEMBINAA N'DAN SUPERVISI	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	PERATURAN / KETENTUAN TERKAIT	PIC SUBBAGIAN / SEKSI	TINDAK LANJUT
4.	Tugas Kuasa BUN	<p>Uraian SPM/SP2D belum mencantumkan nomor dan tanggal Surat keputusan/ Surat Tugas satuan kerja Polres Aceh Tenggara antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPM tanggal 1/08/2017 no.00287;00288;00289;00290 2. SPM tanggal 3/11/2017 no.00527;00533;00534;00538 	<p>Uraian SPM LS untuk Bendahara Pengeluaran atau pihak lainnya paling kurang mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor dan tanggal SPP b. Nomor dan tanggal SK/ST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-153/MK.05/2017 2. Surat Dirjen PBN No. S-2570/PB/2017 	Seksi PDMS	sudah dilakukan koreksi dengan nomor S-13/WPB.01/KP.105/2018 sd S-21/WPB.01/KP.105/2018 tanggal 3 Januari 2018
5.	Tugas Kuasa BUN	<p>Nota konfirmasi penerimaan negara belum ditandatangani petugas konfirmasi antara lain satuan kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Negeri Blangkejeren (099182) tanggal 05/09/2017 2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gayo Lues (061331) tanggal 13/09/2017 (termasuk pengantar data konfirmasi dari satuan kerja belum ditandatangani KPA) 3. Pengadilan Negeri Blangkejeren (098544) tanggal 05/09/2017 	Setiap data konfirmasi penerimaan negara agar ditandatangani oleh petugas yang telah ditunjuk sesuai SK	PER-14/PB/2013	Seksi Bank	Nota Konfirmasi telah ditandatangani oleh Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara (copy terlampir) dan untuk selanjutnya menjadi perhatian kami.

NO.	UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	PERATURAN / KETENTUAN TERKAIT	PIC SUBBAGIAN / SEKSI	TINDAK LANJUT								
6.	Tugas Kuasa BUN	<div><div><div>1. Terdapat rekomendasi dari pimpinan UKI-P KPPN Kutacane yang belum ditindaklanjuti atas Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama pada kegiatan Penelitian terhadap ADK PMRT yang masih harus diupload di SPAN berupa permintaan penghapusan ADK PMRT ke Dit. SITP (s.d. 15 November sejumlah 129 ADK PMRT). Surat permintaan penghapusan ADK PMRT dari Kepala KPPN Kutacane ke Dit. SITP terakhir tanggal 31 Juli 2017.</div><div>2. Pada kegiatan Pertanggung Jawaban UP/TUP KPPN DUPU 5 (pengendalian utama verifikasi bukti pengeluaran dan daftar rincian permintaan pembayaran untuk penerbitan SPP GUP/Nihil) pada bulan per tanggal pemantauan 1 November 2017 tidak dilampirkan.</div><div>3. Terdapat nomor sample dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy yang <i>double entry</i> pada kegiatan Pertanggung Jawaban UP/TUP KPPN DUPU 2 (pengendalian utama verifikasi kelengkapan dokumen pendukung tagihan dan penerbitan SPBy)</div></div><table><tr><td>Agustus</td><td>September</td><td>Oktober</td><td>November</td></tr><tr><td>276-351</td><td>345-396</td><td>397-459</td><td>460-515</td></tr></table></div>	Agustus	September	Oktober	November	276-351	345-396	397-459	460-515	<div><div>1. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Kutacane agar menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan pimpinan UKI-P atas tindakan pemantauan pengendalian yang dilakukan.</div><div>2. Dokumentasi perangkat pemantauan (DUPU, TOPU) agar dilengkapi sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan pemantauan agar dilakukan lebih teliti.</div></div>	<div>KEP-34/PB/2013</div> <div>S-4087/PB.1/2017</div> <div>S-3437/</div>	<div>Seksi PDMS dan Seksi VeraKI</div>	<div>1. Sudah ditindak lanjuti (S-1292/WPB.01/KP.105/2017 tanggal 13 Desember 2017 Untuk selanjutnya Prosedur penghapusan PMRT yang tidak dijadikan SP2D di KPPN Kutacane, dilakukan setiap awal bulan dan tengah bulan (dua kali dalam setiap bulan).</div> <div>2. Sudah dilakukan perbaikan (dokumen terlampir).</div> <div>3. Sudah dilakukan perbaikan sesuai dokumen sumber (perbaikan terlampir).</div>
Agustus	September	Oktober	November											
276-351	345-396	397-459	460-515											
7.	Pelayanan Perbendaharaan	Hasil monitoring layanan CSO KPPN Kutacane pada HAI DJPb sampai dengan tanggal 30 November 2017 ditemukan bahwa	Salah satu tugas CSO KPPN adalah memberikan layanan	PER-50/PB/2016	Seksi PDMS	CSO sudah menindaklanjuti dengan melakukan perekaman setiap aktifitasnya pada Hai								

NO.	UNSUR PEMBINAAN DAN SUPERVISI	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	PERATURAN / KETENTUAN TERKAIT	PIC SUBBAGIAN / SEKSI	TINDAK LANJUT
		jumlah permasalahan satker yang diinput masih rendah (hanya 2 tiket)	helpdesk pada satker dan menginput data layanan pada Hai CSO/ HAI DJPb			DJPBN(terlampir screenshot Laporan Monitoring IKU layanan CSO Aplikasi OM SPAN
8.	Tata Kelola	Belum dilaksanakan penyelenggaraan acara <i>talk show</i> atau dialog melalui radio atau TV tentang berbagai topik seputar pelaksanaan tugas KPPN , MPN G2 dan topik Keuangan Negara lainnya.	KPPN agar bekerja sama dengan media setempat untuk melakukan <i>talk show</i> atau dialog melalui radio atau TV minimal satu kali dalam satu triwulan	KEP-261/PB/2016	Subbagian Umum	Sudah berkoordinasi dengan stasiun radio setempat namun karena kendala teknis terkait izin perpanjangan frekuensi yang belum terbit, sehingga stasiun radio belum bisa kembali melaksanakan siaran. Akan dijadwalkan pada triwulan berikutnya
9.	Tata Kelola	SPM tanggal 29/8/2017 No.00213A rincian biaya perjalanan dinas a.n. Suriat SPPD No.54/WPB.01/KP105/2017 tanggal 25/7/2017 terdapat biaya taksi bandara – hotel Banda Aceh dibayarkan Rp 180.000, tarif pada SBM Rp 123.000 (lebih bayar Rp 57.000)	Atas kelebihan pembayaran tersebut sebesar Rp 57.000 harus disetor ke Kas Negara	PMK 113/PMK.05/2012	Subbagian Umum	Sudah disetorkan ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas atas nama Suriat sebesar Rp 57.000 (terlampir surat setoran)
10.	Tata Kelola	Daftar Barang Ruangan (DBR) belum diperbaharui, masih ditandatangani pejabat yang lama. Juga terdapat ruangan yang belum memiliki DBR antara lain: 1. Gudang Arsip 2. RuangLoker 3. Gudang Barang 4. Ruang Subbagian Umum 5. Ruang FO 6. Ruang Server	DBR tiap ruang harus dibuat dan diupdate setiap ada mutasi barang dan pengantian KPA dan penanggung jawab ruangan.	PMK No. 181/PMK.06/2016	Subbagian Umum	Telah dbuat dan diupdate Daftar Barang Ruangan sesuai kondisi terakhir.

NO.	UNSUR PEMBINAA N DAN SUPERVISI	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	PERATURAN / KETENTUAN TERKAIT	PIC SUBBAGIAN / SEKSI	TINDAK LANJUT
11.	Tata Kelola	1. Data cuti pegawai belum <i>diupload</i> dan <i>diupdate</i> di aplikasi PBNOpen a.n. Mu'ammarr Yasser 2. Dosir cuti masih memuat kartu cuti pegawai yang sudah tidak aktif.	1. Agar data cuti pegawai pada PBNOpen <i>diupload</i> dan <i>diupdate</i> 2. Agar dosir kartu cuti pegawai dirapikan .	S-8651/PB.1/2017	Subbagian Umum	Data cuti telah diupload dan diupdate di PBN Open atas nama Mu'ammarr Yasser beserta data cuti seluruh pegawai di KPPN Kutacane (terlampir screenshot pengawasan cuti di PBN Open). Dosir cuti sudah tidak memuat lagi pegawai yang sudah tidak aktif.
12.	Tata Kelola	Masih banyak terdapat dokumen. laporan (arsip inaktif) tahun 2007 s.d. 2010 belum diusulkan penghapusan	Agar dokumen laporan arsip inaktif diusulkan penghapusannya	SE-01/MK.01/2014	Subbagian Umum	Sedang dalam proses identifikasi dan pemilahan berkas serta barang karena rencana pengajuan penghapusan selain berkas inaktif juga terhadap barang-barang yang sudah layak untuk dihapus.